



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HESTU YOGA SAKSAMA
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 72131

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.936.602.500

1. Tanah Seluas 2350 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 16.802.500
2. Tanah Seluas 3474 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 694.800.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 551 m2/439 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.325.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 231 m2/170 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 51.86 m2/51.86 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 575.000.000

1. MOTOR, HONDA REBEL CMX500 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOBIL, BMW X1 SDRIVE 1.8i Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. MOTOR, YAMAHA RX KING Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
5. MOBIL, HONDA BRIO SATYA Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 17.500.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	2.769.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	614.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	10.912.102.500
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	10.912.102.500

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.